



Gerakan Menuju
**Smart City
2022**

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
KOTA CERDAS (SMART CITY) TAHUN 2022
KABUPATEN MALANG**

(SMART CITY) TAHUN 2022

Nomor : B-1004/DJAI/AI.01.04/12/2022

Jakarta, 6 Desember 2022

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi

Kepada Yth.

(Daftar terlampir)

di Tempat

Sehubungan dengan surat kami Nomor: B-594/DJAI/AI.01.02/08/2022 Tanggal 3 Agustus 2022 tentang Undangan Mengikuti Penilaian Evaluasi Dalam Rangka Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2022, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi *Masterplan* dan *Quick Win Smart City*:

1. Bahwa dari empat puluh satu (41) kabupaten/kota yang terpilih pada Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) 2021 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) dan Ibu Kota Negara Baru (IKN), terdapat tiga puluh tujuh (37) kabupaten/kota yang mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* pada tautan smartcity.layanan.go.id dan menghadiri kegiatan evaluasi yang telah diselenggarakan secara daring pada tanggal 3-7 Oktober 2022.
2. Selain itu terdapat Kota Surabaya yang terpilih pada Gerakan Menuju Kota Cerdas periode 2017-2019 akan tetapi, untuk kali pertama mengikuti kegiatan evaluasi. Oleh karena itu, Kota Surabaya dianggap masih pada fase awal implementasi kota cerdas.
3. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) pada kabupaten/kota dimaksud, berbeda dengan penilaian evaluasi terhadap sembilan puluh sembilan (99) kabupaten/kota yang terpilih pada Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) periode 2017-2019, karena masih berada pada fase awal implementasi program kota cerdas sehingga belum dapat dilakukan penilaian survei *impact* (dampak) terhadap masyarakat.
4. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) sebagaimana dimaksud pada angka satu (1) dan dua (2), diukur berdasarkan lima (5) dimensi, dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:

- a. *Baseline* (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen masterplan kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota, aktivitas dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*, dan realisasi program dan rencana aksi *smart city* di tahun sebelumnya.
 - b. *Output* (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program kota cerdas (*smart city*), untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, serta anggaran untuk program *smart city*.
 - c. *Outcome* (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di *masterplan* kota cerdas (*smart city*), untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah.
 - d. *Impact* (bobot 10%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi program kota cerdas (*smart city*), untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan.
 - e. Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 30%), mencakup tingkat inovasi program percepatan kota cerdas (*smart city*), untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pada program percepatan (*Quick Win*).
5. Hasil penilaian dari lima dimensi tersebut menjadi Indeks Pencapaian atau Rata-rata Bobot (*performance*) merupakan tingkat pembangunan *smart city* dari masing-masing daerah. Indeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata *Baseline*, *Output*, *Outcome*, *Impact*, dan *Quick Win*.
6. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) dimaksud, dilengkapi dengan masukan dari para asesori yang mendeskripsikan beberapa poin kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota (sebagaimana terlampir).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Semuel Abriyani Pangerapan

Tembusan Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo

Lampiran I

Nomor : B-04DJAI/AI.01.04/12/2022

Tanggal : 6 Desember 2022

Kepada Yth.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Bupati Belitung | 22 Bupati Minahasa Utara |
| 2 Bupati Belitung Timur | 23 Bupati Ngada |
| 3 Bupati Buton | 24 Bupati Pacitan |
| 4 Bupati Dairi | 25 Bupati Pakpak Bharat |
| 5 Bupati Halmahera Tengah | 26 Bupati Paser |
| 6 Bupati Halmahera Timur | 27 Bupati Probolinggo |
| 7 Bupati Halmahera Utara | 28 Bupati Pulau Morotai |
| 8 Bupati Humbang Hasundutan | 29 Bupati Purworejo |
| 9 Bupati Karanganyar | 30 Bupati Raja Ampat |
| 10 Bupati Karo | 31 Bupati Samosir |
| 11 Bupati Konawe Selatan | 32 Bupati Semarang |
| 12 Bupati Kudus | 33 Bupati Simalungun |
| 13 Bupati Kutai Barat | 34 Bupati Tapanuli Utara |
| 14 Bupati Lombok Barat | 35 Bupati Temanggung |
| 15 Bupati Lombok Tengah | 36 Bupati Toba |
| 16 Bupati Lombok Utara | 37 Bupati Wakatobi |
| 17 Bupati Malang | 38 Bupati Wonogiri |
| 18 Bupati Manggarai | 39 Walikota Bau Bau |
| 19 Bupati Manggarai Barat | 40 Walikota Malang |
| 20 Bupati Manggarai Timur | 41 Walikota Pasuruan |
| 21 Bupati Minahasa | 42 Walikota Surabaya |

Gambaran Umum

Sebagai bentuk dukungannya pemerintah terhadap pengembangan Smart City di Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden pada tahun 2017 menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 Smart City. Dimulai sejak tahun 2017 hingga 2019 telah terpilih 100 kota/kabupaten yang didampingi dan dibimbing oleh para ahli dalam mengimplementasikan konsep kota cerdas (*smart city*). Program ini kemudian dilanjutkan menjadi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) dimana sejak tahun 2021 telah ditambah 41 kabupaten/kota lainnya yang masuk dalam Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional & Kawasan Ibu Kota Negara Baru dalam penyusunan Masterplan Smart City sehingga secara total telah ada 141 kota/kabupaten yang memiliki Masterplan Smart City dan melaksanakan pembangunannya.

Selanjutnya guna mengawal jalannya pembangunan kota cerdas (*smart city*) dan juga mengidentifikasi permasalahan serta keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan kota cerdas (*smart city*) , maka sejak tahun 2018 telah dilakukan proses evaluasi terhadap implementasi Masterplan Smart City yang telah disusun pemerintah kota/kabupaten. Evaluasi dilakukan untuk tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan serta adanya permasalahan namun juga guna memberikan masukan dan saran bagi pemerintah kota/kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Smart City.

Hasil dari pelaksanaan evaluasi berupa ukuran kemajuan pembangunan Smart City yang dinilai dari 5 dimensi serta saran perbaikan bagi pemerintah kota/kabupaten.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Evaluasi implementasi Smart City dilakukan guna mengawal program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Smart City di tingkat pusat dan daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan akselerasi dokumen Masterplan Smart City dan dokumen RPJMD, melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran pembangunan Smart City di daerah, melakukan pemantauan, evaluasi, dan konsultasi atas implementasi dokumen Masterplan Smart City untuk program Jangka Pendek, termasuk Program Quick Win, serta menjamin proses pengembangan pembangunan Smart City yang efektif, efisien, inklusif, partisipatif dan berkesinambungan.

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Smart City adalah pada aspek keluaran yang dicapai, hasil yang diperoleh, dampak yang dirasakan oleh masyarakat, dan kelangsungan Program Quick Win.

Metodologi Evaluasi

Objek evaluasi implementasi Smart City adalah program pembangunan Smart City di daerah yang dinilai berdasarkan progress serta hasil yang dicapainya. Selanjutnya, evaluasi dilakukan pada pemerintah kota/kabupaten yang telah menyelesaikan proses pendampingan dengan hasil yang sesuai dengan kesepakatan di dalam MoU antara Walikota/Bupati dan Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo. Dimensi dan elemen evaluasi pada tiap-tiap dimensi dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Dimensi	Elemen	Keterangan
Kondisi awal program Smart City (Baseline)	Perencanaan	Ketersediaan dokumen legal perencanaan Smart City
	Realisasi	Sinkronisasi pembangunan Smart City dengan RPJMD dan aktivitas kelembagaan Smart City
Keluaran program Smart City (Output)	Kebijakan	Ketersediaan peraturan yang mendukung pembangunan Smart City
	Kelembagaan	Keberadaan dan aktivitas Lembaga pengelola Smart City (Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City)

	Anggaran	Kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran pembangunan Smart City
Hasil program Smart City (Outcome)	Pelaksanaan program/kegiatan/inovasi per dimensi Smart City	Keterlaksanaan program pembangunan Smart City pada tiap dimensi di tahun berjalan dibandingkan dengan perencanaan
	Pelaksanaan Rencana Aksi	Pelaksanaan rencana aksi yang terkait peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, pengembangan perangkat lunak dan peningkatan literasi
Dampak program Smart City (Impact)	Perbaikan	Perubahan sebelum dan sesudah implementasi Smart City
	Keterlibatan Masyarakat	Peran serta masyarakat dalam program Smart City
Program Quick Win	Pelaksanaan	Perumusan, pelaksanaan dan keberlanjutan Quick Win
	Manajemen Risiko	Identifikasi dan mitigasi risiko terhadap Quick Win

Evaluasi juga dilakukan dengan meninjau beberapa capaian pada aspek berikut ini:

- RPJMD yang telah sejalan dengan konteks pembangunan Smart City;
- Perda/perkada tentang peta jalan (road map) pelaksanaan pembangunan Smart City yang efektif untuk mendukung implementasi pembangunan Smart City;
- Road map program/kegiatan pembangunan Smart City dan rencana aksinya yang sejalan dengan RPJMD;
- Komitmen anggaran pembangunan Smart City;
- Pelaksanaan pembangunan Smart City;
- Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Smart City;
- Wujud/hasil nyata pembangunan Smart City;
- Dampak pembangunan Smart City terhadap birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Hasil Evaluasi Smart City Tahun 2022

No.	Kota/Kab	Baseline (10.00)	Output (20.00)	Outcome (30.00)	Impact (10.00)	Quick Wins (30.00)	Nilai Final
1	KAB. BELITUNG	2.55	2.07	2.87	2.75	2.17	2.46
2	KAB. BELITUNG TIMUR	1.2	1.14	2.26	2	2.02	1.84
3	KAB. BUTON	1.7	1.93	2.17	1.81	1.75	1.92
4	KAB. DAIRI	3.1	2.14	2.43	2.25	2.19	2.36
5	KAB. HALMAHERA TENGAH	1.1	1.07	1.62	1.06	1.25	1.3
6	KAB. HALMAHERA UTARA	2.7	2.46	2.52	2.25	2.38	2.46
7	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	1.8	1.64	2.41	2.19	0.6	1.63
8	KAB. KARANGANYAR	3.3	2.96	3.27	2.94	3.21	3.15
9	KAB. KARO	2.85	2	2.43	1.63	2.6	2.36
10	KAB. KONAWE SELATAN	2.5	1.96	2.43	3.06	2.73	2.5
11	KAB. KUDUS	2.45	2.07	3.11	3.69	3.02	2.87
12	KAB. LOMBOK BARAT	2.9	2.39	3.29	3.06	3.23	3.04
13	KAB. LOMBOK TENGAH	1.45	1.29	2.83	2.69	2.83	2.38
14	KAB. LOMBOK UTARA	2.35	2.11	3.15	1.75	2.5	2.54
15	KAB. MALANG	1.4	1.54	2.92	2.56	3.08	2.51
16	KAB. MANGGARAI	2.05	1.68	2.36	2.38	2.04	2.11
17	KAB. MANGGARAI BARAT	2.1	1.82	2.3	2.19	2.35	2.19
18	KAB. MANGGARAI TIMUR	2.4	2.04	2.5	2.19	2.96	2.51
19	KAB. MINAHASA	1.85	1.39	2.4	2.13	2.73	2.22
20	KAB. MINAHASA UTARA	1.2	1.07	2.35	1	1.79	1.68
21	KAB. PACITAN	2.25	2.11	2.65	2.31	2.27	2.36
22	KAB. PAKPAK BHARAT	2.25	1.71	2.29	2	1.85	2.02
23	KAB. PASER	3.8	2.43	2.73	2.81	3.02	2.88
24	KAB. PROBOLINGGO	2.8	2.21	2.98	2.63	2.44	2.6
25	KAB. PULAU MOROTAI	2	1.61	2.1	1.81	2.04	1.94
26	KAB. PURWOREJO	1.5	1.75	2.32	1.69	1.71	1.88
27	KAB. RAJA AMPAT	1.25	1.14	1.59	1	1.1	1.27
28	KAB. SAMOSIR	1	1	2.47	1.19	2.27	1.84
29	KAB. SEMARANG	2.25	1.96	2.8	1.5	2.71	2.42
30	KAB. SIMALUNGUN	1.3	1.14	1.94	1.38	1.54	1.54
31	KAB. TAPANULI UTARA	1.35	1.5	2.41	1.19	1.77	1.81
32	KAB. TEMANGGUNG	3	2.5	3.27	3.25	3.33	3.11
33	KAB. TOBA	1.05	1	1.69	1.19	1.17	1.29
34	KAB. WONOGIRI	3.95	2.36	3.35	3.88	3.46	3.31

35	KOTA BAU BAU	2.05	1.96	2.67	1.5	2.81	2.39
36	KOTA MALANG	3.35	2.39	3.09	2.94	3.02	2.95
37	KOTA PASURUAN	3.3	2.57	3.22	3.19	2.85	2.99
38	KOTA SURABAYA	3.45	2.68	3.56	3.94	3.52	3.41

Daftar Kabupaten/Kota yang tidak Mengikuti Evaluasi Implementasi Kota Cerdas

No.	Kota/Kab	Baseline	Output	Outcome	Impact	Quick Wins	Nilai Final
1	KAB. HALMAHERA TIMUR	0	0	0	0	0	0
2	KAB. KUTAI BARAT	0	0	0	0	0	0
3	KAB. NGADA	0	0	0	0	0	0
4	KAB. WAKATOBI	0	0	0	0	0	0

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Malang Tahun 2022

A. Baseline				
No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Nilai
1	Perencanaan	1.1 Master Plan Smart City yang sudah memiliki payung hukum	1.1.1 Apakah Master Plan Smart City Daerah Anda sudah memiliki payung hukum?	2,00
		1.2 Aktivitas Dewan Smart City	1.2.1 Apakah Dewan Smart City melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini?	1,00
		1.3 Aktivitas Lembaga Pengelola Smart City	1.3.1 Apakah Pengelola Smart city Daerah Anda melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini bersama OPD terkait smart city?	2,00
2	Realisasi	1.1 Realisasi Program Smart City Tahun sebelumnya	1.1.1 Berapa jumlah program smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	1,00
		1.2 Realisasi Rencana Aksi Smart City tahun sebelumnya	1.2.1 Berapa jumlah kegiatan rencana aksi smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	1,00
Rata-rata				1,40

B. Output				
No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Nilai
1	Kebijakan Smart City	Kebijakan Smart City	2.1 Ketersediaan Peraturan Smart city	2,00
2	Kelembagaan Smart city	Kelembagaan Smart city	2.1 Keberlangsungan Fungsi Dewan Smart city	1,00
			2.2 Keberlangsungan Fungsi Tim Pelaksana Smart city	2,00
			2.3 Keterlibatan OPD dalam Program Smart city	2,75
			2.4 Keberlangsungan Fungsi Forum Smart city Daerah	1,00
3	Anggaran Smart City	Anggaran Smart City	2.1 Ketersediaan Anggaran dari APBD untuk Program Smart city	1,00
			2.2 Ketersediaan Anggaran dari Sumber Pembiayaan Alternatif untuk Program Smart city	1,00
Rata-rata				1,54

C. Outcome				
No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Nilai
1	Program	3.1 Program Smart Governance di tahun berjalan	3.1.1 Sejauh mana program smart governance sudah berjalan di tahun ini?	2,75
		3.2 Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.2.1 Sejauh mana kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (Laporan Keuangan Daerah BPK)?	4,00
		3.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.3.1 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD Kemendagri)?	4,00
			3.3.2 Berapa nilai SPBE KemanPANRB?	1,00
		3.4 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3.4.1 Sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)?	3,00
		3.5 Inovasi Pelayanan Publik	3.5.1 Sejauh mana daerah Anda sudah pernah masuk ke dalam peringkat SINOVIK?	3,50
		3.6 Program Smart Branding di tahun berjalan	3.6.1 Sejauh mana program smart branding sudah berjalan di tahun ini?	2,00

		3.7 Kemudahan Berusaha	3.7.1 Sejauh mana tingkat kemudahan berusaha daerah Anda?	3,00
		3.8 Program Smart Economy di tahun berjalan	3.8.1 Sejauh mana program smart economy sudah berjalan di tahun ini?	2,00
		3.9 Kesejahteraan Masyarakat	3.9.1 Sejauh mana persentase penduduk miskin pada (Tahun - 1)?	3,00
			3.9.2 Sejauh mana IPM di daerah Anda pada (Tahun - 1)?	3,00
			3.10.1 Sejauh mana program smart living sudah berjalan di tahun ini?	2,00
		3.11 Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	3.11.1 Sejauh mana persentase Baduta Stunting yang sudah tertangani 1 tahun terakhir?	3,50
			3.11.2 Sejauh mana persentase Balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap dalam 1 tahun terakhir?	3,00
			3.11.3 Sejauh mana cakupan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan dalam 1 tahun terakhir?	3,00
		3.12 Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	3.12.1 Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (banyaknya rumah tangga dengan akses sumber air minum layak/jumlah rumah tangga) dalam 1 tahun terakhir?	4,00
			3.12.2 Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak/jumlah rumah tangga) dalam 1 tahun terakhir?	4,00
			3.12.3 Sejauh mana Persentase Jalan (kota/kab) Kondisi Mantap (panjang jalan kondisi mantap/total panjang jalan) dalam 1 tahun terakhir?	3,25
		3.13 Program Smart Society di tahun berjalan	3.13.1 Sejauh mana program smart society sudah berjalan di tahun ini?	2,00
		3.14 Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	3.14.1 Sejauh mana Peta Mutu Pendidikan di kota/kabupaten Anda (rasio penduduk usia wajib belajar 9 tahun banding daya tampung)?	3,25
			3.14.2 Sejauh mana Angka Partisipasi Murni wajib belajar 9 tahun di kota/kabupaten Anda (rasio murid wajib belajar 9 tahun dibanding jumlah penduduk usia wajib belajar)?	4,00

		3.15 Kebencanaan	3.15.1 Sejauh mana pemerintah memiliki program mitigasi (sebelum terjadi) bencana?	4,00
			3.15.2 Sejauh mana pemerintah memiliki program penanganan saat bencana?	4,00
			3.15.3 Sejauh mana pemerintah memiliki program pemulihan setelah bencana?	4,00
		3.16 Program Smart Environment di tahun berjalan	3.16.1 Sejauh mana program smart environment sudah berjalan di tahun ini?	2,00
		3.17 Pengelolaan Sampah	3.17.1 Sejauh mana inovasi pembatasan sampah?	3,00
			3.17.2 Sejauh mana inovasi dalam pengelolaan daur ulang dan guna ulang sampah?	4,00
2	Rencana Aksi	3.1 Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas SDM	3.1.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan kapasitas SDM sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	1,00
		3.2 Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart city	3.2.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan infrastruktur sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	1,25
		3.3 Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung Smart city	3.3.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan aplikasi pendukung smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	2,00
		3.4 Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Literasi Smart city	3.4.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan literasi smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	2,00
		Rata-rata		

D. Impact

No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Nilai
1	Perbaikan	4.1 Perubahan sebelum dan sesudah implementasi smart city	4.1.1 Apakah sejak dilaksanakannya smart city di daerah Anda, sudah memberikan perbaikan bagi pelaksanaan proses pembangunan dan juga perbaikan di tengah-tengah masyarakat?	2,25

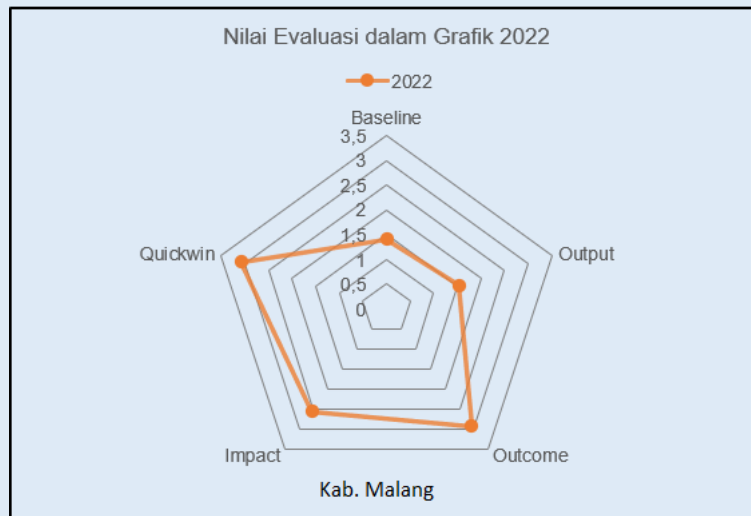
2	Keterlibatan Masyarakat	4.1 Peran serta masyarakat dalam program smart city	4.1.1 Apakah masyarakat sudah ikut berperan serta dalam pelaksanaan smart city di daerah Anda?	2,00
3	Keberlanjutan	4.1 Tindak lanjut Program Smart City	4.1.1 Apakah program program, kota cerdas smart city tahun lalu masih terus berjalan di tahun ini?	3,00
		4.2 Pelaksanaan program kota cerdas tahun berjalan	4.2.1 Apakah ada program yang baru yang dapat ditambahkan menjadi program kota cerdas (smart city) untuk tahun ini?	3,00
		Rata-rata		

E. Quick Wins

No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Nilai
1	Perumusan inovasi	5.1 Perumusan inovasi	5.1.1 Apakah inovasi quick wins dirancang dengan melibatkan seluruh pihak terkait smart city dan telah memperhatikan permasalahan strategis daerah? (permasalahan strategis daerah terdapat di dalam RPJMD)	2,25
2	Daya tarik inovasi	5.1 Daya tarik inovasi	5.1.1 Apakah inovasi quick wins yang dirancang memiliki daya tarik, baik untuk kalangan internal (warga lokal dan pemerintah daerah) maupun eksternal (masyarakat luar daerah)?	3,00
3	Manfaat inovasi	5.1 Manfaat inovasi	5.1.1 Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?	2,75
4	Keunikan inovasi	5.1 Keunikan inovasi	5.1.1 Apakah Inovasi quick wins yang dirancang mengandung keunikan atau ada unsur kreativitas di dalamnya?	4,00
5	Peluang kemitraan	5.1 Peluang kemitraan	5.1.1 Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang dapat membuka peluang kemitraan dengan pihak eksternal?	3,00
6	Potensi pengembangan	5.1 Potensi pengembangan	5.1.1 Sejauh mana inovasi quick wins memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan?	2,75
7	Keberlangsungan	5.1 Keberlangsungan	5.1.1 Apakah pemerintah daerah sudah memiliki strategi untuk menjaga keberlangsungan berjalannya inovasi quick wins?	3,00
8	Sumber daya	5.1 Sumber daya	5.1.1 Apakah sumber daya untuk mengembangkan dan menjalankan inovasi quick wins tersedia?	2,50

9	Manajemen Risiko	5.1 Identifikasi risiko	5.1.1 Sejauh mana pemerintah daerah sudah melakukan identifikasi risiko?	3,75
		5.2 Mitigasi risiko	5.2.1 Sejauh mana pemerintah daerah menyusun rencana mitigasi risiko?	3,75
10	Keberlanjutan	5.1 Keberlanjutan	5.1.1 Sejauh mana program quick wins smart city tahun lalu masih terus berjalan di tahun ini?	2,50
			5.1.2 Berapa banyak program quick wins smart city yang baru untuk tahun ini?	3,75
Rata-rata				3,08

Perbandingan Hasil Evaluasi Tahun 2022



KELEMAHAN DAN KEKUATAN

A. KELEMAHAN

1. Saat pelaksanaan evaluasi jajaran Pemerintah Kabupaten Malang masih fokus pada penanganan Tragedi Kanjuruhan. Banyak pejabat yang tidak bisa hadir dalam proses evaluasi Smart City dan hal ini bisa dimengerti.
2. Belum adanya Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah untuk menetapkan Masterplan Smart City Kabupaten Malang.
3. Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City belum melaksanakan tugasnya dengan baik
4. Forum Smart City belum dilaksanakan secara berkala.
5. Belum adanya rencana aksi pengembangan SDM
6. Pembiayaan program Smart City yang bersumber dari APBD masih sangat minim
7. Nilai indeks SPBE masih rendah

8. Komitmen Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah untuk implelementasi Smart City masih kurang.
9. Jawaban kuesioner belum disertai dengan data dukung yang valid dan lengkap

B. KEKUATAN

1. Proses pengolahan sampah di TPA Talangagung dan TPA Bamboe Petong sangat baik dan patut diapresiasi. Bisa menjadi percontohan.
2. Program mitigasi bencana sudah bagus.
3. Inovasi daur ulang sampah bagus.
4. Penetapan manajemen resiko bagus.
5. Kabupaten Malang memiliki potensi ekonomi (Pariwisata) yang besar.
6. Kabupaten Malang mempunyai potensi yang besar untuk menjadi salah satu smart city yang berhasil, tentu saja harus disertai dengan kelengkapan berbagai aspek yang mengarahkan, mendukung, dan menjaga keberlangsungannya.

REKOMENDASI

1. Mempercepat pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah untuk menetapkan Masterplan Smart City Kabupaten Malang.
2. Meningkatkan sumber pembiayaan APBD dan non-APBD untuk pembiayaan Smart City
3. Perlu meningkatkan kinerja Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City.
4. Perlunya melaksanakan forum smart city secara berkala untuk penyamaan persepsi tentang Smart City dan mereviu implementasi program Smart City.
5. Perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam implementasi Smart City.
6. Perlu meningkatkan sosialisasi tentang Smart City kepada seluruh jajaran ASN di Kabuapten Malang, masyarakat, dan sektor swasta.
7. Perlu meningkatkan literasi digital dan literasi Smart City kepada masyarkaata.
8. Perlu meningkatkan komitmen kepala daerah dan selruh pimpinan perangkat daerah untuk mengimplementasikan smart city.
9. Perlu meningkatkan integrasi dan interoperablitas sistem dan data untuk meningkatkan nilai indeks SPBE dan mewujudkan Satu Data Indonesia.